



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**  
**DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka timur;
  - b. bahwa sesuai Lampiran Romawi I. Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunanyang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
13. Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka Timur

## **BAB II**

### **KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada BPKPD sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis layanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Rekonsiliasi Data Manual oleh DPMPTSP ke BPKPD
  - b. Sistem Aplikasi.

### **Pasal 3**

- (1) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.
- (2) Terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelumnya perlu dilakukan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pajak daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

#### **Pasal 4**

- (1) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;  
dan
  - c. Keterangan Status Wajib Pajak dari BPKPD.
  - d. Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati Kolaka Timur melalui BPKPD melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.

- (2) Bupati Kolaka Timur melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh DPMPTSP.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 17 APRIL 2020  
**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

ttd

**H. TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 20 APRIL 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

ttd

**EKO SANTOSO BUDIARTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

